

# MODEL PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH) Berbasis Kewirausahaan Bagi Buruh Nelayan



**bppnfi regional 5  
makassar**



**lifeskill**



Kementerian Pendidikan Nasional  
Direktorat Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal  
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal  
(BPPNFI) Regional V Makassar - 2011

*model pendidikan  
kecakapan hidup ( PKH )*

Berbasis Kewirausahaan Bagi Buruh Nelayan

***Kementerian Pendidikan Nasional  
Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal  
( BPPNFI ) Regional V Makassar  
Tahun 2011***

## KATA SAMBUTAN

Pembangunan dibidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dengan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja untuk berwirausaha dan menjawab tenaga kebutuhan kerja.

Sejalan dengan itu BPPNFI Regional V sebagai lembaga yang melaksanakan pengembangan dan pengkajian model pendidikan dibidang nonformal setiap tahun berusaha untuk menghasilkan model model yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan nonformal.

Hasil kajian ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat, khususnya bagi para pelaksana, stake holder di lapangan sehingga model yang dikembangkan ini dapat menjadi acuan bagi terlaksananya program-program inovasi di lapangan dalam lingkup pendidikan nonformal.

Kepada penyusun kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerja keras dalam mewujudkan model ini. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa

Makassar, Desember 2010

**Kepala BPPNFI Regional V**



**Muhammad Hasbi, S.Sos M.Pd**

NIP.19730623 199303 1 001

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Model Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Kewirausahaan Bagi Buruh Nelayan.

Model ini telah melalui validasi teoritik yang melibatkan unsur praktisi dan akademisi dan telah divalidasi empirit melalui uji coba pada tempat lokasi di wilayah BPPNFI Regional V Makassar. Hasil validasi empirit menunjukkan tingkat keterpakaian baik, sehingga bisa diterapkan pada wilayah yang memiliki karakteristik yang sama.

Sebagai suatu hasil pengembangan yang baru di uji coba dalam waktu dan tempat yang terbatas, masih memerlukan kajian-kajian untuk perbaikan. Oleh karena itu model ini perlu direfleksikan dan di uji efektifitasnya.

Semoga Model ini bermanfaat baik kepada pengguna maupun bagi peneliti yang akan mengembangkan selanjutnya.

Makassar, Desember 2010

**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	5
1. Tujuan Umum .....	5
2. Tujuan Khusus .....	5
C. Manfaat .....	5
1. Lembaga .....	5
2. Pengguna .....	5
<b>BAB. II KARAKTERISTIK MODEL</b> .....	<b>7</b>
A. Kerangka Model .....	7
1. PKH Melalui Kewirausahaan bagi Buruh dan Nelayan .....	7
2. Analisis Peluang Usaha .....	8
3. Potensi Lokal berbasis Pesisir dan Kepulauan .....	9
4. Identifikasi .....	10
5. Rekrutmen .....	11
6. Kursus dan Pelatihan .....	11
7. Uji Kompetensi Lokal .....	13
8. Jaminan Lulusan .....	13
B. Kelembagaan .....	15
C. Peserta Didik .....	15
D. Pendidik / Instruktur .....	16
E. Kurikulum .....	16
F. Bahan Ajar .....	17
G. Metode Belajar .....	17
1. Curah Gagasan .....	17
2. Study Kasus .....	17
3. Demonstrasi ( demonstration ) .....	17
4. Diskusi ( discussion ) .....	18
5. Permainan ( game ) .....	18
6. Ceramah ( lecture ) .....	18
7. Permainan Peran ( role play ) .....	19
8. Kelompok Kerja ( work group ) .....	19
H. Tempat .....	19
I. Jadwal Belajar .....	19
J. Sarana Prasarana .....	20

K. Pembiayaan .....	20
L. Penilaian .....	21
M. Pendampingan dan Pembinaan .....	21
1. Pendampingan .....	22
2. Pembinaan .....	23
N. Pemandirian Usaha .....	24
<b>BAB. III PENUTUP .....</b>	<b>27</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Boleh berhenti sekolah tapi jangan berhenti belajar mengandung makna bahwa belajar tidak identik dengan masuk sekolah. Belajar bisa di mana saja, kapan saja dengan siapa saja, tentang apa saja sesuai dengan kebutuhan subjek belajar. Dalam masyarakat modern yang dicirikan dengan tumbuhnya *learning society* untuk mencapai *knowledge based society* yang menjadi pilar utama tumbuhnya industri kreatif, maka layanan pendidikan nonformal sangat penting. Kebutuhan belajar yang semakin kompleks sementara keterbatasan waktu dan pembiayaan menuntut adanya layanan pendidikan nonformal yang dicirikan dengan model layanan pendidikan yang fleksibel dalam aturan waktu, mudah dijangkau atau diakses karena tempatnya selalu mendekati pada subyek belajar, murah dan terjangkau pembiayaan namun tetap mengutamakan kualitas layanan dan proses, serta produknya.

Pendidikan nonformal merupakan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam mencapai pendidikan formal oleh karenanya pemerintah memprogramkan untuk menjangkau mereka yang tersisih, tertinggal dan terabaikan serta yang tidak terfasilitasi melalui jalur pendidikan formal. Dengan demikian maka jelas bahwa program pendidikan nonformal memiliki peran dan fungsi yang unik dan spesifik, yang tidak hanya menjadi penampung residu pendidikan nonformal, tetapi dapat menjadi penambah, pelengkap bahkan pengganti. Maka identifikasi dan penentuan program pendidikan nonformal menjadi mutlak diperlukan untuk mengembangkan layanan pendidikan yang mampu menjadi solusi dan alternatif pendidikan bagi masyarakat.

Data (Sakernas, BPS 2008) menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di wilayah perkotaan sebanyak 5.296.426 sedangkan di wilayah pedesaan, pesisir dan kepulauan sebanyak 4.131.174. Populasi penduduk pengangguran lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peluang kerja yang tersedia di pedesaan menyebabkan terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Jika tidak segera ditangani, akan

memungkinkan perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin besar di masa datang.

Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional V Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Ditjen PNFI, salah satu tugas pokoknya adalah pengembangan dan pengkajian program PNFI. Wilayah kerja BP-PNFI Regional V Makassar merupakan daerah pesisir dan kepulauan. Tercatat pada tahun 2009 jumlah pulau yang berpenghuni kurang lebih 436 pulau ( Dep. Kelautan, 2009).

Studi eksplorasi yang dilakukan pada 10 daerah masing-masing; Sulawesi Selatan (Kab. Pangkep, Bone, Bantaeng, Parepare, Palopo Kota), Sulawesi Barat ( Kab. Polman) Sulawesi Tenggara ( Kab. Kolaka), Sulawesi Utara (Bitung Kota), Sulawesi Tengah (Kab. Donggala), Gorontalo (Kab. Gorontalo). Kondisi umum dari sepuluh daerah yang disurvei tidak jauh berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Faktor yang membedakan adalah kondisi geografisnya, kondisi ini mempengaruhi mata pencaharian penduduk setempat. Wilayah yang langsung bersentuhan dengan laut lepas pada umumnya pekerjaan nelayan adalah nelayan penangkap. Wilayah yang letaknya di daerah teluk, pekerjaan nelayan selain nelayan penangkap, ada juga yang melakukan budidaya hasil laut, seperti budi daya kepiting bakau, rumput laut, kerang, pertambakan, penangkaran seperti ikan kerapu, pembuatan jaring, perahu, pengolahan hasil laut dsb. Dari hasil studi eksplorasi yang dilakukan umumnya masyarakat menginginkan pengembangan budidaya rumput laut, yang bagi mereka dianggap dapat menopang ekonomi keluarga karena masa budi daya relative singkat sekitar 41 - 45 hari sudah layak panen. Penentuan daerah uji coba model dengan konsep kewirausahaan berbasis buruh nelayan didasarkan pada keterlibatan pihak mitra dalam menyukseskan kegiatan masyarakat, mitra yang dimaksudkan adalah dinas perikanan dan dinas koperasi kota/kabupaten, adapun tempat uji coba yang direncanakan dengan pelibatan aktif mitra kerja adalah Kabupaten Pangkep (Sulsel), Kabupaten Parigi Moutong (Sulteng) dan Kabupaten Muna (Sultra).

Ada lima permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan PNF pada kawasan pesisir; yaitu tenaga pendidik, kurikulum (menu pembelajaran), dan kemitraan. *Pertama*, tenaga pendidik berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi. Tingkat pendidikan sebagian besar hanya tamatan SMA atau sederajat. Dari segi kompetensi, sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan tenaga pendidik pendidikan nonformal. *Kedua*, kurikulum yang dikembangkan masih cenderung konvensional, masih mengadopsi apa yang sudah ada. Kurikulum belum dirancang berdasarkan potensi dan karakteristik

masyarakat pesisir dan kepulauan. Struktur kurikulum belum disusun berdasarkan materi pokok dan materi penunjang. Rincian materi yang ada dalam kurikulum belum memuat materi pengembangan kepribadian, kemitraan dan kewirausahaan. *Ketiga* pendampingan pasca pelatihan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. *Keempat*, pola kemitraan yang dibangun belum banyak melibatkan unsur-unsur yang terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Lembaga Perbankan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. *Kelima*, potensi sumberdaya daya laut belum dikelola dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, belum diberdayakan secara optimal. Misalnya budi daya rumput laut, budi daya ikan, budi daya kepiting dan pengolahan hasil laut.

Merobah pola pikir masyarakat yang sudah mengakar memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar. Khususnya tentang bagaimana membentuk jiwa kewirausahaan. Perkerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan hanya oleh Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi memerlukan sinergitas berbagai unsur. Oleh karena itu BPPNFI Regional V Makassar mencoba mencari solusi dengan mengembangkan model Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Buruh Nelayan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perencanaan, pelatihan, permodalan dan pendampingan.

Mata pencaharian penduduk pada daerah kawasan pesisir dan kepulauan pada umumnya dibagi atas empat; yaitu home industri, pedagang/distribusi, petani/nelayan dan buruh nelayan.

### **1. Home industri**

Home Industri yaitu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil perikanan. Hal ini bisa berupa mengolah hasil tangkapan ikan, atau kerajinan dari sumberdaya laut; Kelompok ini sangat sedikit jumlahnya, kurang lebih 5%

### **2. Pedagang/distribusi**

Para pelaku ekonomi ini mendistribusikan hasil perikanan, baik berupa perikanan hasil tangkapan nelayan maupun home industri, dan kebanyakan masyarakat pesisir terutama yang pendatang lebih banyak bergerak disektor ini, kelompok ini jumlahnya kurang lebih 10%

### **3. Petani/nelayan**

Petani nelayan adalah nelayan pemilik modal, pelaku ekonomi ini menyewakan peralatan nelayan baik berupa alat tangkap maupun kapal dengan sistem kerja bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang bergerak di sektor ini adalah para

pendatang. Kelompok ini biasanya disebut *punggawa* atau juragan jumlahnya kurang lebih 25%. Walaupun jumlahnya sedikit, cukup berpengaruh di daerah pesisir dan pulau karena sebagian besar penduduk sangat menggantungkan hidupnya pada kelompok ini.

#### 4. Buruh/nelayan

Buruh nelayan adalah nelayan/buruh yang tidak mempunyai modal, dia hanya bermodalkan badan, dan yang bergerak di sektor ini adalah para nelayan tetap atau penduduk asli. Kelompok ini biasa juga disebut *sawi*, hidupnya sangat tergantung *punggawa*. Kelompok ini merupakan kelompok besar di daerah pesisir, jumlahnya kurang lebih 60%.

Pendidikan kursus belum sepenuhnya mampu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap kepada masyarakat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dan informal (PNFI) yang biasanya terlibat dalam melaksanakan program pendidikan nonformal dan informal antara lain BPKB, SKB, PKBM, Lembaga Kursus, Yayasan. Secara struktural BPKB dan SKB merupakan UPT dan UPTD dari Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/kota. PKBM, Lembaga Kursus, Yayasan dan lembaga lainnya merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang sering berperan sebagai mitra dari BPKB dan SKB dalam menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal dan informal.

Secara umum, kapasitas lembaga-lembaga tersebut dalam menyelenggarakan program PNFI masih terbatas. Keterbatasan tersebut terkait dengan:

- 1) Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai untuk menyelenggarakan program secara memadai sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- 2) Belum terdapat keunikan-keunikan pada lembaga-lembaga tersebut khususnya yang mencirikan potensi dan kearifan lokal.
- 3) Sebagian besar lembaga bersifat on-off, karena kegiatannya tergantung pada pendanaan yang bersifat bantuan dari pemerintah.
- 4) Kemitraan belum merupakan tradisi pada lembaga-lembaga penyelenggara PNFI sehingga pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga tidak dapat berjalan seiring dengan dinamika yang terjadi pada PNFI dan di dalam masyarakat.
- 5) Program pendampingan pasca pelatihan belum dilaksanakan secara berkesinambungan.

## **B. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Model ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang berbasis kewirausahaan bagi buruh nelayan yang efektif dan efisien.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Sebagai acuan dalam penerapan pembelajaran pendidikan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan bagi buruh nelayan;
- b. Sebagai acuan dalam menyusun kurikulum pendidikan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan bagi buruh nelayan;
- c. Sebagai acuan dalam melaksanakan pendampingan pasca pembelajaran pendidikan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan bagi buruh nelayan.

## **C. Manfaat Model**

### **1. Lembaga**

#### **a. Ditjen PNFI**

Sebagai bahan acuan bagi Direktorat yang terkait dalam membuat kebijakan penyelenggaraan program PKH bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.

#### **b. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota**

Sebagai bahan acuan bagi Direktorat yang terkait dalam membuat kebijakan penyelenggaraan program PKH bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.

#### **c. Lembaga Penyelenggara**

Sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan program PKH pada kawasan pesisir dan kepulauan

#### **d. Tenaga Pendidik**

Sebagai bahan acuan dalam menyusun/menerapkan kurikulum PKH pada kawasan pesisir dan kepulauan.

### **2. Pengguna**

#### **a. Ditjen PNFI**

#### **b. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

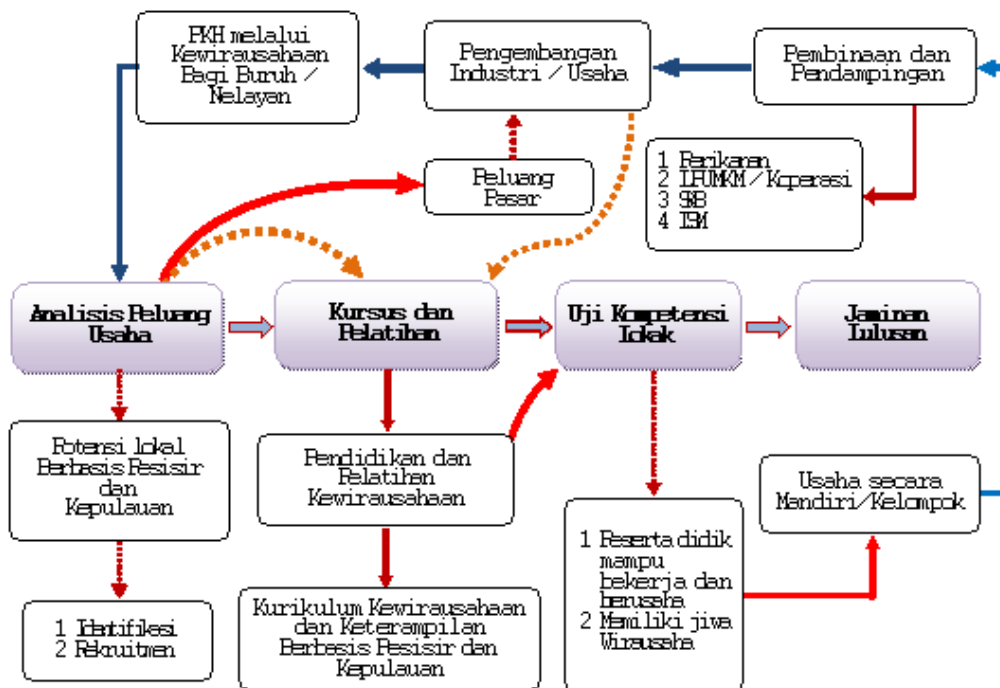
#### **c. Lembaga penyelenggara PNF**

#### **d. Tenaga Pendidik PNF**

## BAB II

### KARAKTERISTIK MODEL

#### A. KERANGKA MODEL



Bagan 1. Alur Pikir Model Pendidikan Kecakapan Hidup berbasis Kewirausahaan Bagi Buruh/Nelayan.

#### 1. PKH melalui Kewirausahaan bagi Buruh dan Nelayan

Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan kecakapan seseorang untuk melaksanakan hidup secara tepat guna dan berdaya guna. Pendidikan kecakapan hidup melalui kewirausahaan adalah suatu bentuk pendidikan untuk meningkatkan kecakapan seseorang melalui sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain.

Pendidikan Kecakapan Hidup melalui kewirausahaan bagi buruh/ nelayan adalah pendidikan yang diberikan bagi buruh / nelayan dan atau keluarga mereka yang tergolong kurang mampu dan miskin dalam konsep pengembangan keterampilan yang berbasis usaha mandiri / kelompok dalam meningkatkan nilai ekonomi keluarga dan tanpa meninggalkan pekerjaan pokok mereka sebagai buruh/ nelayan.

Pendidikan ini ditujukan guna memberikan pengetahuan, keterampilan serta sikap mau berusaha bagi masyarakat buruh/ nelayan beserta keluarganya yang berada pada daerah pesisir dan kepulauan dalam memperoleh hak yang sama dengan masyarakat lainnya melalui pendidikan yang berbasis pada peningkatan ekonominya, sehingga dapat menjalankan hidup dengan wajar dan berdaya guna dalam menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis antar masyarakat pesisir dan kepulauan yang melalui suatu bentuk pendidikan berbasis potensi lokal.

Tujuan program ini mengenalkan kepada masyarakat buruh/ nelayan serta keluarga mereka akan pentingnya pendidikan keterampilan yang dikemas melalui kewirausahaan sebagai bagian dari peningkatan taraf hidupnya selain mata pencaharian pokok yang mereka jalankan, keterampilan kewirausahaan lebih mengarahkan mereka guna mengatur dan membuat perencanaan tentang pengelolaan usaha yang berbasis pada pendapatan secara ekonomi.

## **2. Analisis Peluang Usaha**

Analisis Peluang usaha merupakan suatu bentuk kerja guna melihat kekuatan, kelemahan peluang dan tantangan yang ada baik secara internal maupun eksternal yang bertujuan untuk menganalisis situasi dan kondisi sehingga dapat merumuskan strategi pengembangan usaha.

Analisis peluang usaha adalah mencari dan mengumpulkan berbagai jenis sumber daya yang dianggap potensial dan mempunyai peluang pasar yang menjanjikan dengan mempertimbangkan letak lokasi pengembangan usaha, biaya, sumberdaya manusia yang tersedia, kebutuhan akan produksi yang dihasilkan, serta keuntungan yang akan dicapai.

Hasil study eksplorasi yang dilakukan pada daerah kawasan pesisir dan kepulauan, memungkinkan untuk dikembangkan keterampilan yang berkaitan dengan kewirausahaan pada masyarakat pesisir dan kepulauan dengan kekuatan pengembangan model terletak pada aspek :

- a. Potensi lokal yang dapat dikembangkan adalah budidaya hasil laut
- b. Terdapat banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh/nelayan
- c. Adanya pengumpul hasil budidaya disekitar lokasi uji coba
- d. Terdapatnya tenaga pendidik dalam pengembangan kewirausahaan dan keterampilan budidaya hasil laut yang kompeten.
- e. Minat masyarakat dalam mengembangkan kelompok usaha budidaya yang begitu besar.
- f. Respon pemerintah setempat terhadap kegiatan yang akan dilakukan.
- g. Respon instansi terkait dalam hal kemitraan dan pengembangan usaha kelompok cukup menjanjikan.

Dasar hasil study eksplorasi inilah yang akan menjadi acuan pengembangan model pada kawasan pesisir dan kepulauan dalam bentuk kewirausahaan berbasis keterampilan pesisir dan kepulauan.

Alternatif usaha yang telah ditentukan tidak semuanya layak untuk direalisasikan, untuk itu perlu dilakukan pemilihan peluang usaha yang paling menguntungkan. Pemilihan usaha dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu :

- a. Pemasaran, tingginya permintaan konsumen akan produk dan kurangnya pesaing.
- b. Teknis dan operasi, usaha dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
- c. Hukum, tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku.
- d. Sosial ekonomi, memberi manfaat terhadap masyarakat.
- e. Finansial, menghasilkan arus kas positif yang dapat menutup semua kewajiban dan memberikan keuntungan.
- f. Manajemen, dapat dikelola dengan baik.

### **3. Potensi Lokal Berbasis Pesisir dan Kepulauan**

Potensi lokal berbasis pesisir dan kepulauan adalah semua sumberdaya yang dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat pesisir dan kepulauan dalam menopang kehidupannya. Potensi lokal yang dimaksudkan disini adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam bentuk budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan serta jasa lingkungan.

Dalam mengangkat potensi sumberdaya yang ada menjadi sebuah usaha diperlukan penyadaran tentang arti dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat pesisir dan kepulauan dengan pendekatan yang dilakukan secara terus menerus karena dalam masyarakat masyarakat pesisir dan pulau-pulau dicirikan :

- a. Di dalam wilayah pesisir dan kepulauan terdapat lebih dari satu sumberdaya alam yang dapat dikelola.
- b. Di dalam suatu kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil, biasanya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian dan profesi yang berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan lain-lain yang secara tradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.
- c. Pola hubungan/interaksi ekonomi antar lapisan sosial masyarakat. Program Pendidikan Luar Sekolah yang menjadi bagian dari peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang bijak dalam penanganan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil agar mendapatkan kesempatan merasakan dunia pendidikan dalam rangka mendukung dan mengisi pembangunan.

Dengan melihat ciri yang dikemukakan di atas, maka masyarakat pesisir dan kepulauan mempunyai sumberdaya manusia yang dapat digerakkan dalam mengelolo potensi lokal. Sekaitan dengan hal tersebut peluang usaha menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam membentuk kelompok-kelompok usaha yang diarahkan untuk membangun perekonomian masyarakat dari hasil analisis peluang usaha.

#### **4. Identifikasi**

Identifikasi dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat sekitar sekaitan dengan kondisi masyarakat sekitar. Pemberian maksud tujuan kunjungan disampaikan di awal kemudian meminta tokoh-tokoh masyarakat yang dapat memberikan penjelasan mengenai potensi lokal dan kondisi masyarakat yang akan menjadi bagian dari pelaksanaan program yang diinginkan.

Umumnya tokoh kunci yang ditunjuk masyarakat adalah dari kalangan pemerintahan Desa seperti Kepala Desa atau Ketua BPD, tetapi ada juga yang menunjukkan tokoh masyarakat untuk memberi masukan penjelasan. Kondisi ini sangat bergantung dari bagaimana pemahaman orang-orang terhadap daerahnya dan kondisi masyarakatnya.

Tujuan yang menjadi dasar identifikasi adalah menggali

informasi sekaitan dengan daerah yang akan dijadikan uji coba model untuk menetapkan kriteria yang layak dalam penentuan peserta didik bagi pengembangan proses belajar mengajar kewirausahaan, penetapan identifikasi peserta didik didasarkan atas aspek sosial ekonomi masyarakat, domisili calon peserta didik, rentang usia, status pekerjaan masyarakat serta kesiapan calon peserta dalam mengikuti kegiatan kewirausahaan.

## **5. Rekrutmen**

Peserta didik/kelompok belajar adalah kelompok sasaran yang akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sekaitan dengan pengembangan model yang akan dilakukan pada daerah pesisir dan kepulauan. Peserta didik yang akan menjadi bagian dari uji coba model berasal dari buruh/nelayan dan atau keluarga mereka yang belum mempunyai pekerjaan tetap atau tidak bekerja serta memiliki kemauan dalam mengembangkan kewirausahaan sesuai dengan potensi lokal pada daerah dimana mereka bermukim.

Recruitman dimaksudkan untuk menentukan calon peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Kriteria yang menjadi dasar dari pengembangan model berkaitan dengan peserta didik adalah mempunyai pengetahuan calistung, berdomisili pada daerah uji coba model, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, mengenal potensi daerahnya, bersedia ikut dalam proses pembelajaran serta dapat mengatur waktu dalam mengikuti program ini.

Penentuan calon peserta didik dimaksudkan agar sasaran pembelajaran tercapai dengan asumsi peserta didik mempunyai minat dan bakat dalam mengikuti kegiatan pendidikan kewirausahaan berbasis pesisir dan kepulauan, sehingga tujuan dari kegiatan yang dilakukan dapat tercapai sesuai dengan harapan pengembang.

## **6. Kursus dan Pelatihan**

Dari hasil analisis usaha yang telah diperoleh maka dapat dikatakan bahwa potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia pada daerah pesisir dan kepulauan cukup tersedia, kendala yang dihadapi adalah kurangnya sentuhan pengetahuan terkait dengan keterampilan yang dikembangkan, akses pasar yang masih sulit terkait kualitas produksi dan transportasi, pengembangan usaha masih dilakukan secara tradisional dan belum terbentuknya pola pembinaan dan pendampingan usaha skala kecil dan menengah.

Sekaitan dengan hasil tersebut di atas maka, pengembangan

model ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pada daerah pengembangan melalui kursus dan pelatihan berdasarkan konsep peningkatan keterampilan dan kewirausahaan berbasis pesisir dan kepulauan.

Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan secara singkat (Kamus Indonesia), dan atau program layanan pendidikan nonformal melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada vokasi/keterampilan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang dilakukan sesuai dengan arah kurikulum pembelajaran pendidikan dan latihan.

Kursus adalah program layanan pendidikan nonformal yang berorientasi pada vokasi/keterampilan dalam meningkatkan kecakapan hidup masyarakat/warga belajar dalam bentuk pelayanan yang harmonis antara pemerintah dan mitra terkait dalam menghasilkan luaran pendidikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang disiapkan untuk memasuki dunia kerja atau bekerja mandiri.

#### **a. Pendidikan Kewirausahaan dan Keterampilan**

Arah kebijakan direktorat kursus dan kelembagaan adalah meningkatkan pengetahuan jiwa wirausaha bagi peserta didik yang mengikuti program kursus dan pelatihan, sekaitan dengan kebijakan tersebut, maka pengembangan model ini diarahkan pada pengisian keterampilan berbasis lokal dengan penajaman pada pendidikan kewirausahaan yang bertujuan guna membangun kemandirian peserta didik setelah mereka mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan.

Pendidikan keterampilan dan kewirausahaan adalah bagian yang tak terpisahkan guna keberlanjutan program pasca pelatihan, tujuannya adalah memberikan bekal pengetahuan manajerial bagi peserta didik dalam membangun usaha mandiri sesuai dengan potensi lokal yang telah diperoleh melalui kursus dan pelatihan yang mereka ikuti. Pendidikan kewirausahaan dan pelatihan yang akan dilakukan nantinya lebih diarahkan pada bagaimana masyarakat terkhusus buruh/nelayan dan atau keluarga mereka dapat memperkuat hasil keterampilan yang mereka peroleh melalui kegiatan kemandirian usaha, adapun nantinya yang akan menjadi motivator dalam kegiatan kursus dan pelatihan ini bersumber dari dinas terkait dengan potensi lokal yang akan dikembangkan ( Akademisi dan praktisi perikanan) dan motivator dalam pengembangan kewirausahaan bersumber dari LPUMKM (Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah) yang telahberpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **b. Kurikulum Kewirausahaan dan Keterampilan**

Kurikulum merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berisikan rencana/program terkait dengan materi pembelajaran , alokasi waktu sesuai dengan materi pembelajaran secara teori dan praktek, bahan belajar yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan serta arah/pedoman dari penyelenggaraan program pembelajaran.

Pengembangan materi Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Kewirausahaan Bagi Buruh/Nelayan dilakukan dengan memilah milah pokok pembelajaran antara pembelajaran yang mengkhusus pada kegiatan peningkatan keterampilan baik jasa maupun produk dan pembelajaran penunjang yang berkaitan dengan konsep pembelajar yang ingin dicapai.

Proses pelatihan yang kami maksudkan adalah proses yang dilakukan/dijalankan dalam uji coba model terkait dengan hasil yang diharapkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan nantinya terkait dengan alur pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan sehingga mencapai hasil yang diharapkan adalah adanya pendidik dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan model. Pengembangan kurikulum yang berbasis muatan lokal sesuai dengan jenis keterampilan yang dikembangkan serta mengembangkan bahan ajar yang mudah dipahami oleh peserta didik dengan metode penerapan pembelajaran yang bersentuhan langsung pada obyek keterampilan dan pengembangan jiwa kewirausahaan.

#### **7. Uji Kompetensi Lokal**

Uji kompetensi lokal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami yang telah diajarkan, tujuan lainnya adalah memberikan motivasi bagi peserta dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan di keluarkan oleh dinas perikanan dan LPUMKM. Pengakuan telah mengikuti pelatihan ini pula nantinya dapat difungsikan guna pembinaan oleh dinas perikanan dan pendampingan yang akan dilakukan oleh pihak LPUMKM (Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) .

#### **8. Jaminan Lulusan**

Setelah program ini selesai diharapkan telah terbentuk kelompok usaha budidaya perikanan pada daerah uji coba dengan akses

pasar yang jelas terhadap penyaluran hasil, dari sisi penguatan kelompok pasca pelatihan maka tim pengembang dibantu oleh SKB tempat uji coba model untuk membuka akses kemitraan dengan Dinas Perikanan sebagai Pembina kelompok usaha budidaya perikanan dan Lembaga-lembaga permodalan dalam hal pendampingan usaha sehingga dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Untuk jaminan keberlanjutan kelompok usaha budidaya perikanan pasca pelatihan, maka tim pengembangan telah bekerja sama dengan dinas perikanan dan LPUMKM dengan mekanisme :

### **1. Selama Pelatihan**

- a. SKB : Penyelenggara dan pendamping teknis penerapan model
- b. Dinas Perikanan dan Kelautan : Narasumber teknis terkait keterampilan yang dikembangkan
- c. LSM : Narasumber pemberdayaan kelompok / motivator dalam kelompok usaha
- d. LPUMKM : Narasumber pembelajaran kewirausahaan

### **2. Pasca Pelatihan**

- a. Dinas Perikanan dan Kelautan
  - Melakukan tugas pembinaan keterampilan yang dikembangkan
  - Penguatan kelompok binaan dalam setiap kegiatan perikanan
  - Melakukan evaluasi keberhasilan terhadap kelompok binaan
  - Memberikan bantuan teknis terhadap penguatan kelompok binaan
- b. LPUMKM ( Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah )
  - Akses permodalan usaha kelompok setelah usaha mulai berjalan
  - Pendampingan pembuatan kelompok usaha
  - Pendampingan dalam perencanaan dan analisis kelayakan usaha
  - Pendampingan dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat
  - Sebagai binaan usaha kecil menengah dibawah dinas koperasi

- c. LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat )
  - Fasilitasi kegiatan kelompok
  - Pendampingan dan penguatan kelembagaan
  - Fasilitasi penyusunan mekanisme kerjasama dalam kelompok
  - Akses untuk pasar dan fasilitasi pemasaran bersama
- d. SKB ( Sanggar Kegiatan Belajar ) Pembina kelompok belajar

## **B. KELEMBAGAAN**

Pelaksanaan uji coba model pendidikan kecakapan hidup melalui kewirausahaan bagi buruh/nelayan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan oleh UPTD / SKB dengan melibatkan unsur-unsur terkait dengan program ini dalam mendukung model penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan bagi buruh/nelayan.

UPTD/SKB kota/kabupaten dalam menjalankan dan melaksanakan program disesuaikan dengan jenis vokasi berdasarkan potensi lokal dari daerah uji coba yang mempunyai peluang usaha untuk dikembangkan sesuai dengan hasil analisis tempat uji coba , dan diarahkan terbentuknya kelompok kewirausahaan dalam daerah pengembangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan UPTD/SKB melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait yang didasarkan pada ;

1. Pendataan sasaran dan jenis vokasi yang akan dilaksanakan.
2. Pengembangan kurikulum kewirausahaan.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan .
4. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi melalui lembaga relevan dan atau mitra.
5. Pembinaan dan pendampingan lulusan pada saat pasca pelatihan melalui kelompok usaha.

## **C. PESERTA DIDIK**

Peserta didik direkrut dari kalangan buruh nelayan dan atau keluarga buruh nelayan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar
2. Berusia antara 18 sd 35 tahun
3. Memiliki jiwa kewirausahaan
4. Bersedia mengikuti proses pembelajaran sampai selesai

## **D. PENDIDIK / INSTRUKTUR**

Standar pendidik/instruktur dan tenaga kependidikan PNF adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan dengan standar minimal ;

1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat
2. Memiliki kompetensi sesuai dengan vokasi yang akan dikembangkan
3. Memiliki jaringan kemitraan vokasi yang akan dikembangkan
4. Bersedia menjadi tenaga pendidik

## **E KURIKULUM**

Perencanaan yang akan dilakukan dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal bidang vokasi budidaya perikanan dengan jumlah jam pelajaran 150 jam pelajaran dengan pembagian 100 jam untuk teori dan praktek vokasi dan 50 jam untuk pembelajaran kewirausahaan dengan komposisi 30% teori dan 70% praktik. Materi pelajaran meliputi; (1) kompetensi umum, (2) kompetensi fungsional/ inti dan (3) dan kompetensi spesifik/khusus.

### **1. Kompetensi Umum:**

- a. Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)
- b. Membangun kerjasama dan komunikasi
- c. Membuat perencanaan kerja
- d. Menyiapkan peralatan dan wadah

### **2. Kompetensi Fungsional / Inti**

- a. Membibitkan rumput laut
- b. Pemeliharaan rumput laut
- c. Memanen rumput laut

- d. Mengelola pasca panen rumput laut
- e. Memasarkan bibit rumput laut dan produk rumput laut

### **3. Kompetensi Spesifik / Khusus**

- a. Prinsip-prinsip kewirausahaan
- b. Memulai bisnis usaha budidaya rumput laut
- c. Menetapkan areal lahan produksi
- d. Menyusun strategi dan rencana pengembangan usaha rumput laut
- e. Pengawasan dan evaluasi usaha rumput laut
- f. Membangun jaringan usaha dan pemasaran rumput laut

## **E. BAHAN AJAR**

Bahan ajar yang akan dikembangkan disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan dibahas dengan mengacu pada kurikulum muatan lokal sesuai dengan jenis vokasi yang dikembangkan, secara garis besarnya akan dikembangkan bahan ajar tentang budidaya perikanan (sesuai vokasi) dan bahan ajar kewirausahaan.

## **G. METODE BELAJAR**

### **1. Curah Gagasan**

Curah gagasan adalah situasi pemecahan masalah di mana kepada peserta disajikan suatu masalah dan di minta untuk menyampaikan setiap gagasan yang mereka pikirkan, tidak jadi soal betapapun aneh atau gilanya gagasan itu. Semua gagasan dihimpun dan dicatat, tanpa evaluasi, sebelum didiskusikan. Pengumpulan gagasan biasanya berlangsung selama 5 sampai 15 menit.

### **2. Study Kasus**

Studi kasus adalah peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara lisan berkenaan dengan situasi realistik. Dalam studi kasus dicakupkan rincian secukupnya agar peserta dapat menganalisis masalah dan mengajukan solusi yang mungkin. Dalam banyak kasus, tidak ada satu jawaban yang benar. Studi kasus seyogianya sedapat mungkin mewakili kejadian yang sesungguhnya, baik dalam hal sifat isi dan cara menyajikan dan menyelesaikannya. Meskipun pekerjaan atas kasus itu dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam kelompok. Metode ini harus diakhiri dengan diskusi hasil yang diperoleh.

### **3. Demonstrasi ( demonstration )**

Metode yang menunjukkan bagaimana cara kerja atau melakukan

sesuatu. Metode ini ditetapkan untuk mengilustrasikan atau memperjelas gagasan, proses, atau hubungan. Peran peserta adalah mengamati dan tidak terlibat secara langsung. Metode ini seringkali disertai dengan menyuruh peserta mempraktikkan hal-hal yang didemonstrasikan serta menerima balikan.

#### **4. Diskusi ( discussion )**

Proses eksplorasi topik atau masalah tertentu dalam kelompok. Metode ini efektif untuk digunakan dalam kelompok beranggotakan 10-25 orang. Metode ini sering dipasangkan dengan ceramah atau metode nonpartisipatif lainnya. Dalam diskusi, fasilitator bertindak sebagai katalis dan moderator, mengajukan pertanyaan, mencatat dan atau mengulang tanggapan peserta, dan umumnya membimbing peserta ke arah yang tepat.

#### **5. Permainan ( game )**

Ciri metode ini adalah persaingan terstruktur antara dua atau lebih peserta. Setiap permainan memiliki keunikan aturan dan hasil belajar masing-masing. Sebagian permainan bersifat sederhana, sebagian lain sangat rumit. Fokus utama adalah pada aksi dan reaksi peserta. Meskipun tidak selamanya perlu, permainan simulasi dapat serupa dengan situasi kerja, tetapi dengan unsur persaingan yang ditata dengan seksama. Permainan menyediakan kerangka yang memungkinkan peserta terlibat dalam suasana permainan yang menyenangkan dan sekaligus menegangkan. Suasana ini memungkinkan peserta mengkaji system prosedur pengambilan keputusan interaktif dan pada saat yang sama mengkaji masalah dari perspektif pembelajaran. Tampilan permainan yang menonjol adalah bahwa permainan mencakup seperangkat tugas pengambilan keputusan terstruktur dari suatu situasi sesungguhnya dan menyediakan sarana sistematik untuk mengamati dan mengevaluasi keputusan peserta. Hal-hal itu selanjutnya disampaikan sebagai balikan kepada peserta agar mereka dapat mempeertimbangkan kelayakannya. Kebanyakan permainan dimainkan oleh satu atau lebih tim, yang masing-masing beranggotakan 1 samapai 20 orang.

#### **6. Ceramah ( lecture )**

Presentasi lisan yang disampaikan seorang nara sumber kepada sekelompok peserta. Karena penyampaian itu langsung satu arah dan peserta hanya mendengarkan, maka cara ini perlu ditingkatkan dengan alat bantu audio visual dan digabungkan dengan metode yang lebih aktif ( misalnya diskusi atau latihan). Ceramah dapat diberikan kepada sekelompok besar peserta dan waktunya juga dapat tidak terbatas. Namun, yang lebih efektif adalah ceramah singkat sekitar 15 sampai 30 menit.

## **7. Permainan Peran ( role play )**

Metode interaksi manusia yang melibatkan perilaku realistik tidak dalam setting pekerjaan. Dua atau lebih pemain mendapat uraian masalah atau konflik yang harus diupayakan untuk ditangani. Peserta hanya menerima garis besar uraian peran. Para pengamat secara kritis menontong interaksi pemain. Setelah peran dimainkan, para pemain peran, para peserta mengalami perilaku dan emosi mereka sendiri serta pengaruhnya terhadap orang lain dalam situasi interaksi.

## **8. Kelompok Kerja ( Work Group )**

Dengan metode ini, tiga sampai delapan peserta bekerja sama melaksanakan suatu tugas untuk menghasilkan luaran tertentu (misalnya saran, solusi masalah). Tujuannya biasanya adalah menerapkan hasil belajar untuk memecahkan masalah. Metode ini seharusnya tidak digunakan untuk mengenal bahan baru.

## **H. TEMPAT**

Tempat merupakan lokasi berlangsungnya aktivitas pembelajaran secara teori maupun praktek yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan penerapan model dalam suatu wilayah/daerah tertentu. Terkait dengan pengembangan model *Pendidikan Kecakapan Hidup melalui kewirausahaan bagi buruh nelayan*, maka tempat yang dimaksudkan disini adalah daerah pesisir/pulau dimana calon warga belajar bertempat tinggal dan melakukan aktifitasnya sehari-hari, dan ketersediaan lahan dalam pengembangan keterampilan pesisir/pulau dalam bentuk usaha budidaya hasil perikanan.

Pengembangan pendidikan kewirausahaan melalui keterampilan bagi buruh/nelayan dilakukan dengan pengisian pembelajaran secara teori dalam bentuk kelas yang telah tersedia pada tempat pelaksanaan uji coba berupa ruang/balai pertemuan, kelengkapan berupa bangku, papan tulis dengan kapasitas ruang pembelajaran yang dapat menampung warga belajar dalam sekali pertemuan, sedangkan pada bagian praktek/penerapan keterampilan, membuat uji coba lapangan (lab site) yang berada dekat dengan lingkungan warga belajar berupa lahan/daerah pesisir untuk persiapan budidaya hasil perikanan, sebagai bagian dari dukungan keterampilan secara lapangan.

## **I JADWAL BELAJAR**

Jadwal pembelajaran dibuat guna menentukan kegiatan pembelajaran keterampilan, sehingga dalam menentukan jumlah jam pelajaran dilakukan dengan melibatkan kelompok belajar. Sedangkan waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara

narasumber/ instruktur, peserta didik dan penyelenggara/ pengelola program.

## **J SARANA PRASARANA**

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan harus dipersyaratkan minimal ;

### **1. Ruang Belajar**

Ruang belajar minimal terdiri dari satu ruangan praktek dan satu ruangan teori dengan daya tampung ideal sesuai dengan jumlah peserta.

### **2. Bengkel/Laboratorium Lapangan**

a. Sarana bengkel/laboratorium/lapangan minimal sesuai dengan jumlah peserta didik dan atau jumlah kelompok pembelajaran.

b. Bahan dan alat telah tersedia dan dapat digunakan peserta dalam memenuhi keterampilannya sesuai kebutuhan pembelajaran yang dilakukan.

c. Alat dan bahan praktek tersedia cukup

d. Alat dan bahan layak dipergunakan

e. Alat dan bahan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan

f. Terdapat buku panduan penggunaan (buku praktek)

## **K. PEMBIAYAAN**

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur aspek aspek dan besar biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (satuan penyelenggaraan). Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh warga belajar untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya,

air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Standar biaya pengelolaan dalam penyelenggaraan *Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Kewirausahaan Bagi Buruh/Nelayan* memiliki standar minimum yang dipersyaratkan sebesar Rp. 1,500,000/orang, dengan rincian ; biaya personal 50%, biaya operasional 40% dan manajemen penyelenggaraan 10%

## **L. PENILAIAN**

### **1. Penilaian awal (pretes)**

Penilaian ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Teknik penilaian dilakukan melalui tes atau wawancara. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun program pembelajaran selanjutnya.

### **2. Penilaian proses**

Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daya serap yang telah dicapai oleh peserta didik. Teknik penilaian dapat dilakukan melalui tes tertulis, observasi, pengamatan penyelesaian tugas-tugas dan unjuk kerja.

### **3. Penilaian akhir**

Penilaian ini dilakukan setelah seluruh rangkaian proses pembelajaran dilaksanakan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang disyaratkan. Teknik penilaian dilakukan melalui tes untuk materi teori, dan unjuk kerja untuk materi praktek. Bobot penilaian untuk materi teori 30% dan materi praktek 70%.

## **M. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN**

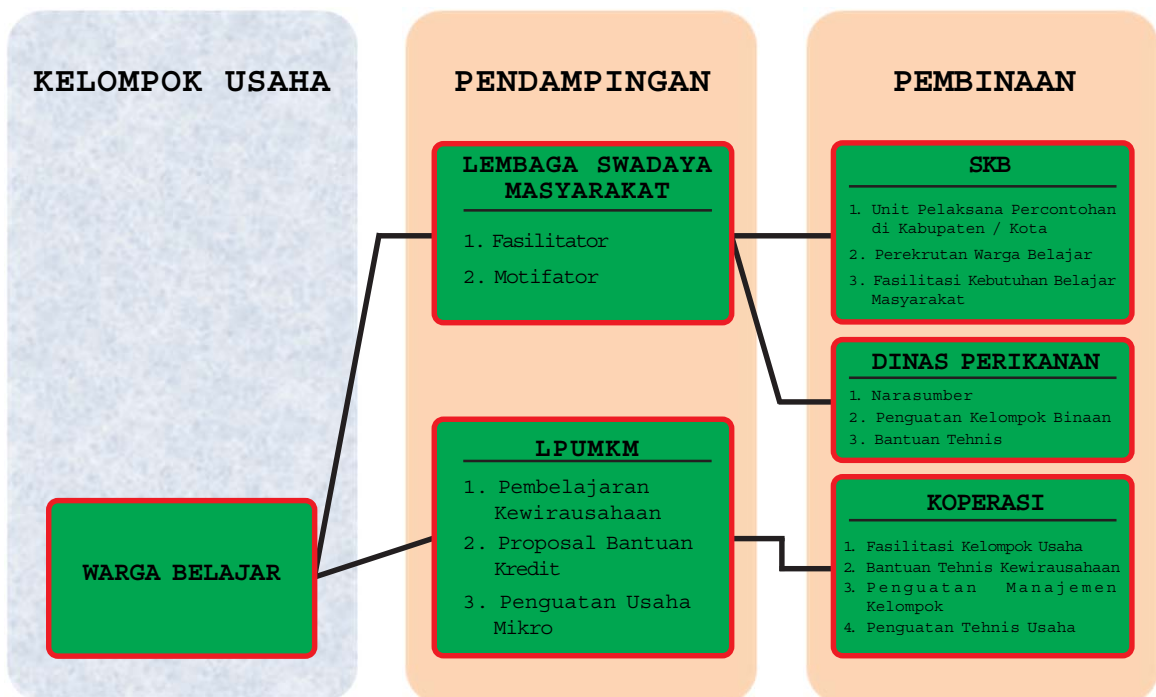
Pendampingan sendiri bermakna bantuan dari pihak luar, baik perorangan mau kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh,

dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai

manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan guna bantuan dalam rangka mempertahankan kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan. Fungsi pembinaan sendiri merupakan kegiatan yang bermakna memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam kurung masa tertentu sehingga kegiatan yang telah dilakukan dapat mencapai hasil yang baik, pembinaan ini pula dapat berperan dalam memberikan motivasi bagi kelompok yang dibina. Pembinaan dapat dilakukan oleh unsur-unsur yang terkait dengan kegiatan sehingga terjalin kedekatan emosional antara masyarakat yang dibina dengan unsur Pembina, dalam hal ini unsur Pembina dapat berasal dari instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai.



Bagan 2. Fungsi Pendampingan dan Bimbingan

## 1. Pendampingan

### a. LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat )

1. Memberikan bantuan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan masyarakat yang meliputi, survey potensi, pendataan calon warga belajar

bersama dengan SKB, penyiapan sumber belajar dan pembentukan kelompok wirausahaan serta menghubungkan hasil kewirausahaan dengan pasar.

2. Bertindak sebagai motivator dalam kelompok yang bertujuan memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi guna menjaga keharmonisan dalam kelompok. Serta secara rutin melakukan diskusi-diskusi dalam pengembangan dan penguatan kelompok usaha.
3. LSM juga merupakan bagian dari kesepakatan dari instansi terkait dalam rangka melakukan kegiatan pendampingan terhadap kelompok yang telah dibentuk.

**b. LPUMKM ( Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah )**

1. Melakukan pendampingan terhadap hasil kegiatan belajar kewirausahaan dalam bentuk aplikasi lapangan terhadap keterampilan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
2. Melakukan pendampingan terhadap pengajuan proposal dalam pengembangan usaha yang dilakukan setelah kegiatan selesai dalam memperkuat unit usaha masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dikembangkan, serta memfasilitasi keinginan kelompok dalam mengakses prekreditasi perbankan.
3. Melakukan pendampingan dalam rangka penguatan unit usaha masyarakat melalui promosi dan pameran.
4. LPUMKM merupakan lembaga yang ditunjuk langsung oleh Dinas Koperasi dalam rangka melakukan pendampingan unit-unit usaha mikro kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat.

**2. Pembinaan**

**a. Sanggar Kegiatan Belajar**

1. Sebagai Unit Percontohan Program  
Mengembangkan unit-unit percontohan pembelajaran yang ada dimasyarakat melalui fasilitasi kebutuhan masyarakat dengan sumber belajar yang sesuai.
2. Melakukan control berkala terhadap kelompok-kelompok binaan yang terkait dengan program yang dilakukan, sehingga dapat memberikan pemecahan masalah terhadap apa yang dihadapi oleh kelompok binaan dalam rangka penguatan kelompok-kelompok binaan.

3. Melakukan koordinasi dengan lembaga masyarakat yang kompeten dalam rangka pendampingan kelompok.

**b. Dinas Perikanan dan Kelautan**

1. Memberikan bantuan tenaga pengajar sesuai dengan yang dikembangkan serta penerapan teknologi pembudidayaan dalam mendukung pembelajaran masyarakat.
2. Pemberian bantuan pelatihan teknis, bantuan teknis dan pengakuan terhadap kelompok yang telah ada dalam rangka penguatan kegiatan kelompok usaha budidaya rumput laut.

**c. Dinas Koperasi dan UKM**

1. Memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan pada kelompok-kelompok binaan yang telah terbentuk.
2. Memfasilitasi dalam rangka penguatan kelompok wirausaha melalui penguatan manajemen kelompok, pembekalan kewirausahaan, perencanaan pengembangan usaha, pengajuan proposal per kreditan serta pembinaan kelangsungan bina usaha.
3. Memberikan bantuan pendampingan melalui lembaga bentukan Dinas Koperasi dan Bank Indonesia dalam rangka penguatan dan monitoring kelompok binaan.

## **N. PEMANDIRIAN USAHA**

Pemandirian yang diharapkan dari warga masyarakat, adalah terbentuknya kelompok-kelompok usaha budidaya di daerah uji coba dengan adanya kepastian harga dan hasil usaha budidaya yang diambil/dibeli oleh pengusaha rumput laut. Terbentuknya jalinan antara pembudidaya rumput laut yang dilakukan oleh kelompok yang tidak lain merupakan warga belajar dengan pasar lokal dalam memenuhi kebutuhan perusahaan akan hasil dari budidaya rumput laut. Dan paling diharapkan dari kemandirin yang dilakukan adalah setiap kelompok uji coba akan memiliki kapling usaha budidaya rumput laut secara perongan tetapi tetap dalam kontrol ketua-ketua kelompok dalam memfasilitasi pemasaran dan penjaminan mutu hasil pengeringan usaha rumput laut.

Pemandirian yang dilakukan melalui pengembangan model Kewirausahaan bagi Buruh Nelayan melalui keterampilan Budidaya Rumput Laut mengacu pada potensi wilayah dan lahan yang tersedia, sehingga diharapkan kelompok yang terbentuk akan memiliki kapling budidaya sendiri-sendiri yang dilakukan secara bertahap. Dalam



## **BAB III**

# **P E N U T U P**

Model Pendidikan Kecakapan Hidup ( PKH ) ) Berbasis Kewirausahaan Bagi Buruh Nelayan ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup ( PKH ) dan membantu masyarakat khususnya yang ada didaerah pesisir dalam mengejar ketertinggalan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha dengan menerapkan sistem kebersamaan demi untuk peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik.

Apabila mendapatkan kesulitan dalam memahami dan menerapkan model ini, dapat menghubungi BPPNFI Regional V, Jl. Adhiyaksa No. 2 Panakkukang-Makassar Kode pos 90231 Telp. 0411 440065, Fax 0411 421460, atau email: [support@bppls-reg5.go.id](mailto:support@bppls-reg5.go.id).

Makassar, Desember 2010

**Tim Penyusun**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. 1999. *Membangun Kembali Karakter Bangsa. Peran dan Tantangan Perguruan Tinggi*. Makalah (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Panitia Seminar Humaniora Diesnatalis ke 50 Universitas Gadjah Mada.
- Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Coombs, P. & Manzoor, H.A. 1994. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Rajawali.
- Dietrieck G. Bogen, 2001, *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut, Pusat Kegiatan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, Institut Pertanian Bogor
- Gibbs, G, 1981. *Teaching Studies to Learning*. Melton Keynes: The Open University Press.
- H.A.R. Tilaar. 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- ....., 2000. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Indrakusuma, A.D. 1989. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Knowles, M.S. 1984. *Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Napitupulu, W.P. 1999. *Pengembangan dan Pelembagaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dalam Mencerdaskan Bangsa*". Pada seminar sehari Pengembangan PLS Memasuki Meleneum Ketiga Dalam rangka Peringatan HAI ke 34 tahun 1999. Jakarta: Crown-Dikmas.
- Rogers, A (1993), *Adult Learning for Development*. London. Cassel.
- Rohmin Dahuri, Jacob Rais, Saptu Ginting, M.J Sitepu, 1996, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradya Paramita, Jakarta
- Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang: Y A 3 Malang

- Smith, D. Dan M.J. Offerman (1989), *“The Management of Adult and Continuing Education”*. *Handbook of Adult and Continuing Education*. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung, Bandung
- Supriharyono, 2000, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang standar isi untuk program paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang standar proses Pendidikan Kesetaraan program paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: CV. Eko Jaya.